J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Evolusi Wilayat Al-Faqih: Dari Akar Sejarah Safawiyah Hingga Dominasi Politik Iran Modern

Mohamad Indra Israqi[1], Mulawarman Hannase[2]
[1,2] Magister Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia
E-mail: : mohamad.indra41@ui.ac.id[1], mulawarmanhannase@ui.ac.id[2]

Article History:
Received: 10 Maret 2025
Revised: 01 April 2025
Accepted: 08 April 2025

Keywords: *Wilayatal-Faqih, Safawiyah, Revolusi Iran 1979, Ayatollah Khomeini,Teokrasi Iran, Dominasi politik Iran.*

Abstrak: *Pemikiran politik Ayatollah Khomeini tentang Wilayat al-Faqih telah menjadi dasar bagi sistem pemerintahan Iran pasca-revolusi 1979. Konsep ini menekankan peran ulama dalam kepemimpinan negara dan memiliki dampak luas terhadap geopolitik Timur Tengah. Iran menggunakan Wilayat al-Faqih sebagai alat ekspansi ideologis, mempengaruhi dinamika politik di Lebanon, Suriah, Irak, dan negara-negara Teluk. Artikel ini menganalisis evolusi konsep Wilayat al-Faqih dalam sejarah politik Iran, dari akar Safawiyah hingga implementasi modernnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Iran secara aktif memanfaatkan Wilayat al-Faqih sebagai instrumen geopolitik untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, yang memicu ketegangan dengan kekuatan regional lainnya seperti Arab Saudi dan Israel.*

PENDAHULUAN

Wilayat al-Faqih adalah konsep yang diperkenalkan oleh Ayatollah Khomeini sebagai dasar bagi pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang faqih atau ulama yang memiliki otoritas tertinggi dalam menjalankan negara. Konsep ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan memiliki akar sejarah yang panjang dalam tradisi politik Iran sejak era Safawiyah. Sejak Revolusi Islam 1979, Iran telah memanfaatkan jaringan milisi dan kelompok politik yang berafiliasi dengan ideologi Wilayat al-Faqih untuk memperkuat pengaruhnya di negara-negara seperti Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman.

Dalam berbagai kajian sebelumnya, pemikiran Khomeini mengenai Wilayat al-Faqih telah banyak dibahas oleh para akademisi seperti Hamid Dabashi dan Said Arjomand (Arjomand, 2009; Dabashi, 2006). Mereka telah menguraikan dasar filosofis dan implikasi politik dari konsep ini, serta bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam sistem pemerintahan Iran. Namun, penelitian yang membahas secara spesifik bagaimana Wilayat al-Faqih berevolusi dalam sejarah politik Iran dan digunakan sebagai instrumen geopolitik Iran di kawasan Timur Tengah masih terbatas (Abrahamian, 2008; Nasr, 2006). Sebagian besar kajian yang ada berfokus pada aspek teologis dan internal Iran, sementara analisis mendalam mengenai dampak konsep ini terhadap hubungan internasional dan strategi ekspansi Iran masih belum mendapat perhatian yang memadai.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, penelitian ini akan menganalisis bagaimana Wilayat al-

Faqih berkembang dari masa Safawiyah hingga diterapkan dalam pemerintahan Iran modern, serta bagaimana konsep ini digunakan sebagai alat ekspansi ideologis Iran, termasuk pengaruhnya terhadap kelompok-kelompok politik dan milisi di Timur Tengah. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi respons dari berbagai aktor internasional terhadap ekspansi ideologis Iran, termasuk negara-negara di kawasan serta kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang hubungan antara ideologi politik dan kebijakan luar negeri Iran.

TINJAUAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori Neorealisme dalam hubungan internasional, yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz (1979). Neorealisme menekankan bahwa negara bertindak dalam sistem anarki internasional untuk menjaga kepentingan dan keamanannya. Teori ini relevan dalam menganalisis bagaimana Iran menggunakan Wilayat al-Faqih sebagai instrumen geopolitik untuk memperkuat posisinya di Timur Tengah. Dibandingkan dengan teori lain seperti Konstruktivisme, yang menitikberatkan pada peran ide dan identitas, Neorealisme lebih cocok untuk memahami bagaimana Iran menjalankan ekspansi ideologisnya melalui strategi kekuatan dan keamanan. Oleh karena itu, Neorealisme digunakan dalam penelitian ini karena memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis dalam menganalisis kebijakan luar negeri Iran berdasarkan keseimbangan kekuatan regional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kepustakaan. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, serta pidato dan tulisan Khomeini. Penelitian ini menggunakan pendekatan geopolitik untuk memahami bagaimana Wilayat al-Faqih menjadi alat kebijakan luar negeri Iran. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan studi ini. Tahapan penelitian meliputi:

1. Pengumpulan Data: Mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang membahas Wilayat al-Faqih.
2. Analisis Sejarah: Mengkaji evolusi konsep Wilayat al-Faqih dari era Safawiyah hingga Iran modern.
3. Analisis Geopolitik: Menganalisis bagaimana Iran menggunakan konsep ini dalam kebijakan luar negerinya.
4. Evaluasi Respons Internasional: Mengidentifikasi reaksi negara-negara di kawasan terhadap ekspansi Iran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Iran: Dari Dinasti Safawiyah ke Era Khomeini

Dinasti Safawiyah (1501-1736):

Safawiyah membentuk identitas Syiah sebagai doktrin negara, menanamkan dasar bagi konsep ulama sebagai Sejarah Dinasti Safawiyah Dinasti Safawiyah (1501–1736) merupakan salah satu dinasti Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah Timur Tengah. Dinasti ini mengubah Persia (Iran) menjadi pusat kekuasaan Islam Syiah, sekaligus membentuk identitas politik dan budaya Iran modern. Salah satu ciri khas utama Dinasti Safawiyah adalah

keberhasilannya dalam menyatukan kekuatan politik dan agama dengan menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara. Andrew Newman dalam bukunya *Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire* (2006) menyatakan bahwa dinasti ini unik dalam kemampuannya menggabungkan otoritas agama dengan kekuasaan politik, mengubah Persia menjadi benteng Syiah yang membentuk lanskap geopolitik kawasan (hlm. 87). Keputusan ini membawa konsekuensi besar, termasuk rivalitas panjang dengan Kesultanan Utsmaniyah yang bermazhab Sunni.

Dinasti ini berawal dari sebuah tarekat sufi yang didirikan oleh Safi al-Din Ardabili (1252–1334 M) di Ardabil, Azerbaijan. Pada awalnya, tarekat ini bersifat keagamaan dan spiritual, tetapi pada masa kepemimpinan Syekh Junayd dan putranya, Syekh Haydar, tarekat ini mulai berkembang menjadi kekuatan politik dan militer. Puncak transformasi terjadi ketika putra Haydar, Ismail I (1487–1524 M), berhasil merebut Tabriz pada tahun 1501 dan memproklamirkan dirinya sebagai Shah Persia. Ia langsung menetapkan Syiah sebagai mazhab resmi negara dan melakukan kampanye militer untuk memperluas kekuasaannya di seluruh Persia. Roger Savory dalam *Iran Under the Safavids* (1980) mencatat bahwa penetapan Syiah Dua Belas Imam sebagai agama negara adalah tindakan revolusioner yang membedakan Persia dari tetangga-tetangga Sunni-nya, terutama Kesultanan Utsmaniyah (hlm. 115).

Puncak kejayaan Dinasti Safawiyah terjadi pada masa pemerintahan Shah Abbas I (1587–1629 M). Ia dikenal sebagai reformis yang berhasil mengembalikan stabilitas politik, ekonomi, dan militer Persia. Beberapa kebijakan utama Shah Abbas I meliputi reformasi militer dengan membangun pasukan elit *ghulam*, yang terdiri dari budak Kristen yang diislamkan dan dilatih sebagai tentara profesional, serta relokasi ibu kota dari Qazvin ke Isfahan, yang kemudian menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan. Selain itu, ia juga menjalin kerja sama perdagangan dengan Eropa, terutama Inggris dan Belanda, untuk melawan dominasi Utsmaniyah. Shah Abbas I juga terkenal karena proyek pembangunan megahnya, termasuk Masjid Shah dan Lapangan Naqsh-e Jahan di Isfahan, yang masih berdiri hingga saat ini sebagai simbol kejayaan arsitektur Safawiyah. Willem Floor dalam *Safavid Government Institutions* (2001) berpendapat bahwa Shah Abbas adalah penguasa terbesar Safawiyah, berhasil mereformasi militer dan menghidupkan kembali ekonomi Persia melalui perdagangan internasional (hlm. 215).

Setelah wafatnya Shah Abbas I, Dinasti Safawiyah mulai mengalami kemunduran akibat lemahnya kepemimpinan, korupsi, kemerosotan administratif, serta tekanan eksternal. Pemerintahan mulai dipenuhi oleh pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara. Sementara itu, Kesultanan Utsmaniyah dan Rusia terus menekan perbatasan Persia, sementara suku Afghan mulai memberontak di bagian timur. Pada tahun 1722, pasukan Mahmud Afghan berhasil menaklukkan Isfahan, menandai berakhirnya kekuasaan Safawiyah di Persia. David Morgan dalam *Medieval Persia 1040-1797* (2016) mencatat bahwa kemunduran Dinasti Safawiyah ditandai dengan konflik internal, salah urus administrasi, dan invasi eksternal yang melemahkan otoritas pusat (hlm. 154).

Meskipun mengalami kehancuran, Dinasti Safawiyah meninggalkan warisan yang sangat berpengaruh, termasuk Syiah sebagai identitas Iran, perkembangan seni dan arsitektur, serta dampaknya terhadap geopolitik Timur Tengah. Dinasti ini mengukuhkan Syiah sebagai mazhab utama di Iran, yang masih bertahan hingga sekarang. Isfahan tetap menjadi salah satu kota dengan warisan arsitektur Islam terbaik di dunia. Selain itu, konflik Sunni-Syiah yang dimulai pada masa Safawiyah masih berdampak pada hubungan politik di Timur Tengah hingga saat ini. Roger Savory (1980) menyimpulkan bahwa warisan Dinasti Safawiyah tetap hidup dalam identitas keagamaan, warisan budaya, dan institusi politik Iran modern (hlm. 243).

Dinasti Safawiyah memainkan peran kunci dalam sejarah dunia Islam. Keberhasilan mereka dalam membangun negara Syiah yang kuat telah meninggalkan dampak jangka panjang terhadap geopolitik Timur Tengah. Meskipun akhirnya runtuh akibat lemahnya kepemimpinan dan tekanan eksternal, warisan mereka tetap hidup dalam budaya, agama, dan politik Iran modern. pemimpin politik dan agama (Katouzian, 2009).

Dinasti Qajar (1789-1925):

Ulama memainkan peran besar dalam perlawanan terhadap imperialisme Barat, tetapi tidak memiliki kendali langsung atas pemerintahan (Arjomand, 2009). Dinasti Qajar (1789–1925) adalah sebuah dinasti yang berkuasa di Persia (sekarang Iran) setelah jatuhnya Dinasti Zand dan sebelum naiknya Dinasti Pahlavi. Qajar adalah dinasti yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam dan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Islam Syiah menjadi landasan ideologi politik dan sosial mereka, yang berdampak pada kebijakan dalam negeri serta hubungan internasional.

Dinasti Qajar berasal dari suku Qajar, kelompok Turkmen yang awalnya menjadi bagian dari konfederasi Qizilbash yang mendukung Safawiyah. Setelah jatuhnya Dinasti Safawi dan periode ketidakstabilan yang diikuti oleh pemerintahan Afshar dan Zand, Agha Mohammad Khan Qajar mendirikan dinasti ini pada akhir abad ke-18. Ia berhasil menyatukan kembali Persia dan menegaskan kendali atas wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Safawi.

Menurut Abbas Amanat (2017), “Dinasti Qajar berusaha mengembalikan stabilitas di Persia dengan menegakkan sistem pemerintahan sentral yang kuat dan memanfaatkan legitimasi Islam Syiah untuk mendukung otoritas mereka” (Amanat, 2017, hlm. 231). Dengan kata lain, Dinasti Qajar melihat Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga alat politik yang dapat memperkuat kekuasaan mereka.

Qajar sangat bergantung pada ulama Syiah untuk mendapatkan legitimasi. Mereka mendukung pembangunan madrasah dan masjid serta memberikan keistimewaan kepada para ulama. Hubungan simbiosis antara ulama dan negara Qajar memberikan ulama pengaruh besar dalam politik dan hukum.

Salah satu peristiwa penting dalam hubungan ulama dan negara adalah gerakan anti-korupsi yang dipimpin oleh Mirza Shirazi, seorang ulama besar yang mengeluarkan fatwa larangan tembakau pada tahun 1891. Fatwa ini menentang monopoli tembakau yang diberikan oleh pemerintah Qajar kepada perusahaan Inggris. Gerakan ini mencerminkan kekuatan ulama dalam membentuk kebijakan negara (Keddie, 1980, hlm. 154).

Dinasti Qajar menghadapi tekanan besar dari kekuatan-kekuatan Eropa seperti Rusia dan Inggris. Kekalahan dalam perang melawan Rusia (1804–1813 dan 1826–1828) menyebabkan Persia kehilangan wilayah-wilayah penting di Kaukasus. Selain itu, perjanjian seperti Perjanjian Gulistan (1813) dan Perjanjian Turkmenchay (1828) mengukuhkan pengaruh Rusia di Persia.

Dalam konteks Islam, kekalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelemahan negara Islam dalam menghadapi kekuatan Eropa. Para ulama dan intelektual mulai mendiskusikan perlunya reformasi dalam negara Islam agar dapat menghadapi tantangan modernitas (Nikki R. Keddie, 1980, hlm. 162).

Pada pertengahan abad ke-19, beberapa penguasa Qajar seperti Naser al-Din Shah (1848–1896) mulai memperkenalkan reformasi yang bertujuan untuk memodernisasi Persia. Namun, banyak reformasi ini gagal karena perlawanan dari kelompok konservatif dan ulama. Modernisasi yang setengah hati ini justru memperburuk ketidakstabilan politik.

Selain itu, Revolusi Konstitusional Persia (1905–1911) menandai titik balik dalam sejarah

Qajar. Para intelektual, ulama, dan masyarakat menuntut pembentukan parlemen dan pembatasan kekuasaan raja. Revolusi ini mencerminkan ketegangan antara Islam sebagai alat legitimasi monarki dan Islam sebagai inspirasi bagi demokratisasi.

Dinasti Qajar akhirnya runtuh pada tahun 1925 setelah kudeta yang dipimpin oleh Reza Khan, yang kemudian mendirikan Dinasti Pahlavi. Meskipun Qajar runtuh, pengaruhnya terhadap politik Islam di Iran tetap terasa, terutama dalam hubungan antara ulama dan negara serta dalam diskursus reformasi Islam.

Menurut Ervand Abrahamian, "Dinasti Qajar mungkin telah gagal mempertahankan kedaulatannya, tetapi mereka meninggalkan warisan dalam bentuk struktur politik dan sosial yang kemudian membentuk revolusi-revolusi berikutnya di Iran" (Abrahamian, 2008, hlm. 93).

Sejarah Dinasti Pahlavi: Modernisasi, Otoritarianisme, dan Kejatuhan

Dinasti Pahlavi (1925–1979) merupakan dinasti terakhir yang memerintah Iran sebelum berdirinya Republik Islam Iran. Dinasti ini didirikan oleh Reza Shah Pahlavi setelah runtuhnya Dinasti Qajar dan diakhiri dengan penggulingan Mohammad Reza Shah Pahlavi dalam Revolusi Islam 1979. Periode Pahlavi ditandai dengan modernisasi yang pesat, sekularisasi, hubungan kompleks dengan Barat, serta represi politik yang pada akhirnya memicu revolusi.

Pada awal abad ke-20, Iran mengalami ketidakstabilan akibat kelemahan Dinasti Qajar dan intervensi asing dari Rusia dan Inggris. Pada tahun 1921, Reza Khan, seorang perwira militer Persia dari Brigade Kosak, melakukan kudeta terhadap pemerintahan Qajar dengan dukungan Inggris. Setelah mengonsolidasikan kekuasaannya, ia secara resmi menggulingkan Dinasti Qajar pada tahun 1925 dan mendirikan Dinasti Pahlavi, mengangkat dirinya sebagai Reza Shah Pahlavi. Menurut Ervand Abrahamian (2008), "Reza Shah memanfaatkan kekacauan politik dan kelemahan Qajar untuk memperkenalkan model pemerintahan yang lebih terpusat, di mana negara berperan aktif dalam modernisasi dan pembangunan ekonomi" (Abrahamian, 2008, hlm. 58).

Reza Shah melakukan berbagai reformasi besar:

1. Modernisasi Infrastruktur: Membangun jaringan jalan, jalur kereta api, dan sistem pendidikan modern.
2. Sekularisasi: Membatasi pengaruh ulama dalam pemerintahan dan mengganti hukum Islam dengan hukum sekuler.
3. Militerisasi Negara: Memperkuat tentara sebagai alat utama kontrol negara.
4. Nasionalisasi: Mengurangi pengaruh asing, termasuk dalam sektor minyak yang dikuasai oleh perusahaan Inggris.

Reza Shah juga berusaha menciptakan identitas nasional Iran yang lebih sekuler dengan menekankan warisan Persia pra-Islam. Sebagai bagian dari kebijakan ini, pada tahun 1935 ia mengganti nama Persia menjadi Iran. Namun, kebijakan otoriter dan hubungannya yang semakin erat dengan Jerman menyebabkan ketidakpuasan. Pada tahun 1941, setelah invasi Sekutu ke Iran selama Perang Dunia II, Inggris dan Uni Soviet memaksa Reza Shah turun takhta dan menggantikannya dengan putranya, Mohammad Reza Shah Pahlavi.

Pada awal pemerintahannya, Mohammad Reza Shah menghadapi tekanan dari kelompok nasionalis, ulama, dan komunis. Salah satu peristiwa kunci dalam periode ini adalah nasionalisasi industri minyak Iran oleh Perdana Menteri Mohammad Mossadegh pada tahun 1951, yang mengancam kepentingan Inggris dan Amerika Serikat.

Pada tahun 1953, dengan dukungan CIA dan MI6, Mohammad Reza Shah berhasil menggulingkan Mossadegh dalam Operasi Ajax dan memperkuat kendalinya atas Iran. Kudeta

ini mengakibatkan:

1. Penghapusan oposisi politik, termasuk Partai Tudeh yang berhaluan komunis.
2. Peningkatan pengaruh Barat dalam kebijakan ekonomi dan politik Iran.
3. Penggunaan SAVAK, polisi rahasia yang digunakan untuk menekan perlawanan.

Menurut Mark Gasiorowski (1991), "Kudeta 1953 menjadi titik balik dalam politik Iran, menandai awal dari pemerintahan otoriter Mohammad Reza Shah yang semakin bergantung pada Barat dan menggunakan kekerasan terhadap lawan-lawannya" (Gasiorowski, 1991, hlm. 87).
Revolusi Putih (1963): Modernisasi yang Menuai Kontroversi Pada tahun 1963, Shah meluncurkan Revolusi Putih, sebuah paket reformasi yang mencakup:

1. Reformasi agraria: Membagi tanah kepada petani kecil untuk mengurangi kekuatan tuan tanah feodal.
2. Peningkatan hak perempuan: Memberikan hak suara kepada perempuan dan memperluas akses mereka ke pendidikan.
3. Industrialisasi cepat: Mendorong pembangunan industri modern di Iran.

Namun, reformasi ini mendapat perlawanan dari berbagai kelompok, terutama ulama Syiah yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Khomeini menentang sekularisasi dan pengaruh Barat, dan ia diasingkan setelah mengkritik Shah secara terbuka.
Krisis dan Revolusi Islam 1979. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Shah meningkat karena:

1. Korupsi dan kesenjangan ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan kesenjangan sosial.
2. Represi politik: Penindasan oleh SAVAK meningkatkan kebencian terhadap rezim.
3. Westernisasi yang dipaksakan: Menimbulkan ketegangan antara tradisi Islam dan nilai-nilai Barat.
4. Krisis ekonomi akibat penurunan harga minyak pada 1970-an.

Pada tahun 1978, demonstrasi besar-besaran meletus di seluruh Iran. Pada Januari 1979, Mohammad Reza Shah melarikan diri ke luar negeri, dan pada Februari 1979, Ayatollah Khomeini kembali ke Iran, memimpin Revolusi Islamyang menggulingkan Dinasti Pahlavi dan mendirikan Republik Islam Iran.

Sejarah Republik Islam Iran di Era Ayatollah Khomeini (1979–1989)

Era Ayatollah Ruhollah Khomeini (1979–1989) merupakan periode transformatif dalam sejarah Iran. Setelah menggulingkan Dinasti Pahlavi melalui Revolusi Islam 1979, Iran berubah dari monarki sekuler menjadi Republik Islam yang berlandaskan teori Wilayat al-Faqih (Kepemimpinan Ulama). Pemerintahan Khomeini ditandai oleh restrukturisasi politik, konflik ideologi, Perang Iran-Irak, serta penguatan Islamisme dalam kebijakan domestik dan luar negeri.

Pada 1 Februari 1979, Ayatollah Khomeini kembali ke Iran setelah 15 tahun di pengasingan. Dengan dukungan luas dari berbagai kelompok masyarakat, terutama ulama dan kaum revolusioner Islam, ia mengarahkan proses transformasi politik Iran. Pada 1 April 1979, melalui referendum nasional, Iran secara resmi menjadi Republik Islam Iran**.**

Dalam sistem baru ini, Khomeini menerapkan Wilayat al-Faqih**,** di mana seorang ulama memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Hal ini tertuang dalam Konstitusi Iran 1979, yang menyatakan bahwa "Pemimpin Tertinggi (Rahbar) memiliki otoritas dalam urusan politik, militer, dan keagamaan" (Dabashi, 1993, hlm. 52). Khomeini kemudian menjadi Pemimpin Tertinggi pertama Iran.

Restrukturisasi Politik dan Sosial

Pembentukan Pemerintahan Islam:

1. Majelis Ulama dibentuk untuk mengawasi kebijakan negara.
2. Pasukan Garda Revolusi Islam (IRGC) didirikan sebagai pelindung revolusi.
3. Partai politik sekuler seperti Tudeh (Komunis) dan kelompok pro-monarki dibubarkan.

Islamisasi Hukum dan Masyarakat:

1. Hukum Syariah diterapkan secara ketat, termasuk dalam hukum pidana dan perdata.
2. Kebijakan wajib hijab bagi perempuan diberlakukan pada 1983.
3. Pendidikan dan media dikendalikan oleh negara untuk menyebarkan nilai-nilai Islam.

Krisis Sandera Iran (1979–1981)

Salah satu peristiwa utama yang mencerminkan perubahan hubungan Iran dengan Barat adalah Krisis Sandera Iran. Pada 4 November 1979, mahasiswa revolusioner menyerbu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran dan menyandera 52 diplomat AS selama 444 hari. Tindakan ini didasarkan pada dugaan keterlibatan AS dalam kudeta terhadap Mohammad Mossadegh pada 1953 dan dukungan AS terhadap Shah Iran yang melarikan diri.

Menurut Abrahamian (2008), "Krisis sandera tidak hanya mengkonsolidasikan kekuasaan Khomeini, tetapi juga merusak hubungan Iran dengan AS secara permanen" (Abrahamian, 2008, hlm. 193). Sandera akhirnya dibebaskan pada 20 Januari 1981 setelah perundingan panjang.

Perang Iran-Irak (1980–1988)

Pada 22 September 1980, Irak yang dipimpin Saddam Hussein menyerang Iran, memulai perang yang berlangsung selama delapan tahun. Perang ini disebabkan oleh:

1. Sengketa perbatasan di kawasan Shatt al-Arab.
2. Ketakutan Saddam terhadap ekspor Revolusi Islam Iran ke Irak.
3. Dukungan AS dan negara-negara Arab kepada Irak untuk melemahkan Iran pasca-revolusi.

Selama perang, Iran menggunakan strategi perang manusia, mengandalkan pasukan Basij (relawan Islam) dalam serangan besar terhadap Irak. Perang ini berakhir tanpa kemenangan jelas melalui gencatan senjata PBB (Resolusi 598)pada 1988.

Menurut Hiro (1991), "Perang Iran-Irak memperkuat nasionalisme Iran dan meningkatkan legitimasi Khomeini di dalam negeri, meskipun dampak ekonominya sangat menghancurkan" (Hiro, 1991, hlm. 274).

Kebijakan Dalam Negeri dan Oposisi Politik, Khomeini menghadapi perlawanan dari berbagai kelompok:

1. Mujahidin Khalq (MEK): Kelompok militan sekuler yang menentang kepemimpinan ulama.
2. Kelompok nasionalis dan liberal seperti Mehdi Bazargan, yang mengkritik otoritarianisme Khomeini.
3. Etnis minoritas, termasuk Kurdi dan Baluchi, yang menuntut otonomi lebih besar.

Tindakan keras terhadap oposisi dilakukan melalui eksekusi massal, termasuk pembantaian tahanan politik pada 1988, di mana ribuan orang dieksekusi atas perintah Khomeini. Kematian Khomeini dan Transisi Kepemimpinan. Pada 3 Juni 1989, Ayatollah Khomeini meninggal dunia akibat komplikasi kesehatan. Kepemimpinan Iran kemudian

diteruskan oleh Ayatollah Ali Khamenei, yang ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi Iran melalui keputusan Dewan Ahli.

Era Khomeini (1979–1989) merupakan masa transformasi Iran dari negara sekuler menjadi republik Islam yang berbasis hukum Syariah. Meskipun berhasil mempertahankan revolusi dan memperkuat identitas Islam politik, periode ini juga ditandai oleh konflik domestik, perang berkepanjangan, dan isolasi internasional. Warisan Khomeini tetap terasa dalam politik Iran hingga saat ini, dengan sistem Wilayat al-Faqih masih menjadi landasan pemerintahan.

2. Konsep Wilayat al-Faqih dalam Pemikiran Khomeini

Wilayat al-Faqih (Kepemimpinan Ulama) adalah teori politik yang menjadi dasar bagi Republik Islam Iran pasca-Revolusi 1979. Konsep ini berakar dalam teologi dan filsafat politik Syiah, yang menempatkan ulama sebagai pemimpin sah dalam ketiadaan Imam Mahdi. Ayatollah Ruhollah Khomeini adalah tokoh utama yang mengembangkan dan menerapkan doktrin ini dalam sistem politik modern.

Asal-Usul Wilayat al-Faqih

Dalam teologi Syiah, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Imam Maksum, yaitu keturunan langsung dari Nabi Muhammad melalui garis Imam Ali. Namun, setelah Imam ke-12, Muhammad al-Mahdi, memasuki Ghaibah Kubra (Occultation) pada tahun 941 M, Syiah menghadapi pertanyaan tentang siapa yang berhak memimpin umat Islam.

Para ulama Syiah mengembangkan konsep kepemimpinan sementara, dengan fuqaha (ahli hukum Islam) berperan dalam membimbing masyarakat berdasarkan hukum Islam. Konsep ini mengalami evolusi hingga berkembang menjadi Wilayat al-Faqih dalam bentuknya yang lebih eksplisit. Perkembangan Historis Konsep Wilayat al-Faqih:

1. Masa Klasik: Ulama seperti Shaykh al-Mufid (948–1022 M) dan Allama al-Hilli (1250–1325 M) berpendapat bahwa ulama memiliki otoritas dalam urusan keagamaan, tetapi tidak secara eksplisit dalam politik.
2. Era Safawi (1501–1736): Dinasti Safawi memperkuat peran ulama dengan menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi. Ulama seperti Muhammad Baqir Majlisi (1627–1699 M) mendukung peran ulama dalam pemerintahan.
3. Era Qajar (1789–1925): Konsep Marja'iyyah berkembang, di mana seorang mujtahid terkemuka dianggap sebagai sumber otoritas tertinggi dalam hukum Islam.

Ayatollah Khomeini dan Wilayat al-Faqih

Ayatollah Khomeini mengembangkan konsep Wilayat al-Faqih dalam kuliah-kuliah yang diberikan di Najaf (1969), yang kemudian dibukukan dalam *Hukumat-e Islami* (*Pemerintahan Islam*). Menurutnya, dalam ketiadaan Imam Mahdi, ulama harus memiliki kekuasaan politik penuh untuk menjalankan hukum Islam. Khomeini berargumen bahwa:

1. Islam adalah agama politik, sehingga hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan publik dan kenegaraan.
2. Hukum Islam tidak bisa dijalankan tanpa pemerintahan Islam, dan karena itu, ulama harus memegang kekuasaan politik.
3. Wilayat al-Faqih adalah kelanjutan dari kepemimpinan para Imam, dengan faqih (ulama ahli hukum) sebagai wakil Imam Mahdi.

Menurut Khomeini (1970), "Karena Islam memiliki hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan, maka harus ada pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang faqih untuk

menerapkan hukum tersebut" (Khomeini, 1970, hlm. 34).

Kritik terhadap Wilayat al-Faqih

Meskipun Wilayat al-Faqih diterima oleh banyak ulama dan masyarakat Syiah di Iran, konsep ini mendapat kritik dari berbagai pihak:

1. Ulama Tradisionalis: Seperti Ayatollah Abu al-Qasim Khoei, yang menolak gagasan bahwa ulama harus memiliki kekuasaan politik penuh.
2. Kelompok Reformis: Beberapa ulama modern seperti Mohsen Kadivar berpendapat bahwa Wilayat al-Faqih bertentangan dengan prinsip demokrasi.
3. Kaum Sekularis: Menganggap konsep ini sebagai bentuk teokrasi yang membatasi kebebasan politik dan hak asasi manusia.

Menurut Kadivar (1999), "Wilayat al-Faqih bukanlah bagian dari doktrin asli Syiah, tetapi lebih merupakan interpretasi politik yang berkembang pada abad ke-20" (Kadivar, 1999, hlm. 88).

Perbedaan dengan sistem politik Islam lainnya seperti Kekhalifahan Sunni

Wilayat al-Faqih adalah doktrin yang berkembang dalam mazhab Syi'ah, terutama setelah revolusi Iran 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Doktrin ini menegaskan bahwa dalam ketiadaan Imam Mahdi (yang diyakini sebagai pemimpin yang ghaib oleh Syi'ah Imamiyah), seorang faqih atau ulama yang paling cakap dalam hukum Islam berhak memimpin negara dan mengatur masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Menurut Khomeini, konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa faqih (ulama ahli hukum Islam) memiliki otoritas dalam mengelola urusan umat, sebagaimana Rasulullah dan para Imam Syi'ah memiliki otoritas mutlak atas umat Islam (Khomeini, 1981). Wilayat al-Faqih menempatkan otoritas tertinggi di tangan seorang faqih, yang bertindak sebagai pemimpin spiritual dan politik.

Khomeini menjelaskan:

"Wilayat al-faqih tidak hanya berarti bahwa para fuqaha memiliki otoritas dalam urusan hukum Islam, tetapi juga dalam mengelola pemerintahan dan politik sebagai wakil dari Imam Mahdi." (Khomeini, 1981: 30).

Struktur pemerintahan dalam sistem ini melibatkan pemimpin tertinggi yang disebut Rahbar atau Supreme Leader, yang memiliki kewenangan atas seluruh aspek pemerintahan, termasuk pengawasan atas Presiden dan lembaga negara lainnya.

Konsep Kekhalifahan Sunni

Sementara itu, dalam tradisi Sunni, sistem politik yang dominan adalah Kekhalifahan. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa seorang khalifah harus dipilih melalui musyawarah atau kesepakatan umat (*ijma'*), meskipun dalam praktiknya banyak khalifah yang naik takhta melalui pewarisan dinasti.

Kekhalifahan Sunni menekankan bahwa pemimpin negara (*khalifah*) bertindak sebagai pelindung agama dan administrator politik, tetapi tidak memiliki otoritas spiritual yang absolut. Kekhalifahan tidak mengenal konsep *Wilayat al-Faqih*, karena dalam Islam Sunni tidak ada sistem kepemimpinan agama yang berkelanjutan setelah wafatnya Nabi Muhammad selain ulama sebagai penafsir hukum, bukan sebagai pemimpin politik langsung.

Al-Mawardi (972-1058) dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menyatakan bahwa:

"Kekhalifahan didasarkan pada prinsip bahwa seorang imam atau khalifah harus memiliki keadilan, ilmu, dan kemampuan politik, tetapi kekuasaannya harus tunduk pada hukum syariah yang dijaga oleh para ulama." (*Al-Mawardi, 1983: 25*).

Dalam sistem kekhalifahan, otoritas ulama bersifat konsultatif (*shura*), bukan pemerintahan langsung. Khalifah bertanggung jawab kepada umat Islam dan dapat digantikan jika ia melanggar prinsip-prinsip Islam.

Perbedaan Fundamental antara Wilayat al-Faqih dan Kekhalifahan Sunni
Tabel 1.

Aspek	Wilayat al-Faqih	Kekhalifahan Sunni
Sumber Legitimasi	Wilayah (otoritas) diberikan kepada seorang faqih sebagai wakil Imam Mahdi	Dipilih oleh umat Islam melalui syura atau warisan dinasti
Pemimpin Tertinggi	Rahbar (Supreme Leader), yang merupakan ulama tertinggi	Khalifah, yang bisa berasal dari berbagai latar belakang (ulama atau non-ulama)
Hubungan dengan Ulama	Ulama memiliki kekuasaan penuh dalam sistem pemerintahan	Ulama hanya sebagai penasihat atau otoritas keagamaan
Sistem Pemerintahan	Teokrasi dengan supremasi ulama	Pemerintahan Islam berbasis hukum syariah dengan pemimpin politik sekuler
Prinsip Dasar	Hukum Islam ditafsirkan Dan diterapkan oleh pemimpin ulama	Syariah sebagai hukum negara, tetapi tidak ditafsirkan oleh pemimpin politik secara eksklusif
Peran Umat	Kedaulatan berada di tangan pemimpin agama yang dianggap sebagai wakil Tuhan	Umat memiliki peran dalam memilih atau mengganti khalifah
Contoh dalam Sejarah	Iran pasca-1979	Kekhalifahan Rasyidun, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah

Konsep *Wilayat al-Faqih* dan *Kekhalifahan Sunni* mencerminkan dua model pemerintahan Islam yang berbeda secara mendasar. Wilayat al-Faqih menempatkan ulama sebagai pemimpin mutlak yang memiliki kekuasaan politik dan spiritual, sedangkan Kekhalifahan Sunni lebih menekankan pada kepemimpinan politik dengan ulama sebagai penasihat keagamaan.
Sistem *Wilayat al-Faqih* lebih dekat dengan konsep teokrasi, sementara *Kekhalifahan Sunni* lebih fleksibel dalam struktur politiknya, yang memungkinkan adanya variasi dalam bentuk pemerintahan yang berkembang di berbagai era sejarah Islam.

3. Struktur Pemerintahan Iran dan Supremasi Pemimpin Tertinggi

Wilayat al-Faqih merupakan konsep kepemimpinan yang menjadi dasar politik Iran pasca-revolusi 1979. Konsep ini menegaskan bahwa seorang faqih (ulama ahli hukum Islam) memiliki otoritas tertinggi dalam pemerintahan, sebagaimana dirumuskan oleh Ayatollah

Ruhollah Khomeini dalam "Velayat-e Faqih: Hokumat-e Islami". Implementasi dari teori ini termanifestasi dalam struktur politik Iran yang memberikan supremasi kepada Pemimpin Tertinggi (Rahbar).

Menurut Arjomand (2009), sistem politik Iran berbentuk republik Islam dengan struktur pemerintahan yang unik, di mana Pemimpin Tertinggi memiliki kewenangan luas yang melebihi presiden. Pemimpin Tertinggi memiliki kendali atas militer, peradilan, media, serta kebijakan luar negeri dan domestik. Selain itu, institusi seperti Dewan Wali (Guardian Council) dan Dewan Ahli (Assembly of Experts) berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan negara tetap berada dalam koridor Wilayat al-Faqih.

Arjomand (2009) juga mencatat bahwa meskipun Iran memiliki elemen demokrasi dalam bentuk pemilihan presiden dan parlemen, supremasi Pemimpin Tertinggi membatasi ruang gerak institusi-institusi ini. Setiap kebijakan dan undang-undang harus disetujui oleh Dewan Wali, yang bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Tertinggi. Dengan demikian, sistem politik Iran tetap didominasi oleh hierarki ulama yang berpusat pada Wilayat al-Faqih.

Peran Garda Revolusi Islam (IRGC) dalam Menjalankan Ideologi Wilayat al-Faqih

Garda Revolusi Islam Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) merupakan kekuatan militer dan politik utama yang bertugas menjaga dan menjalankan ideologi Wilayat al-Faqih. Didirikan setelah Revolusi Islam 1979, IRGC memiliki misi utama untuk melindungi sistem pemerintahan Islam dan menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri.

Alfoneh (2012) menyoroti bahwa IRGC tidak hanya berfungsi sebagai lembaga militer, tetapi juga memiliki peran politik dan ekonomi yang signifikan. Dalam politik, IRGC bertindak sebagai penjaga ideologi revolusi dan sering kali terlibat dalam mengawasi serta menekan oposisi politik yang dianggap bertentangan dengan prinsip Wilayat al-Faqih. Di bidang ekonomi, IRGC mengendalikan sejumlah besar perusahaan dan proyek infrastruktur, menjadikannya sebagai salah satu aktor ekonomi paling berpengaruh di Iran.

Lebih lanjut, Alfoneh (2012) menegaskan bahwa IRGC beroperasi sebagai perpanjangan tangan Pemimpin Tertinggi dalam menjalankan kebijakan luar negeri Iran, terutama di kawasan Timur Tengah. Melalui pasukan Quds, IRGC mendukung kelompok-kelompok milisi di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman untuk memperluas pengaruh Iran serta mempertahankan ideologi Wilayat al-Faqih di luar perbatasannya.

Kebijakan Domestik yang Memperkuat Otoritas Wilayat al-Faqih

Dalam konteks kebijakan domestik, pemerintah Iran menerapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat otoritas Wilayat al-Faqih dan membatasi pengaruh oposisi serta kelompok reformis. Brumberg (2001) menjelaskan bahwa kebijakan domestik Iran pasca-revolusi cenderung otoriter meskipun tetap mempertahankan elemen pemilu dan parlemen.

Brumberg (2001) mencatat bahwa sistem hukum Iran didasarkan pada syariat Islam yang diinterpretasikan sesuai dengan kepentingan Pemimpin Tertinggi. Kebebasan berekspresi dan berorganisasi dibatasi secara ketat melalui pengawasan terhadap media dan sensor terhadap kritik yang ditujukan kepada Wilayat al-Faqih. Institusi keamanan seperti Basij dan IRGC sering digunakan untuk menekan demonstrasi dan gerakan pro-demokrasi.

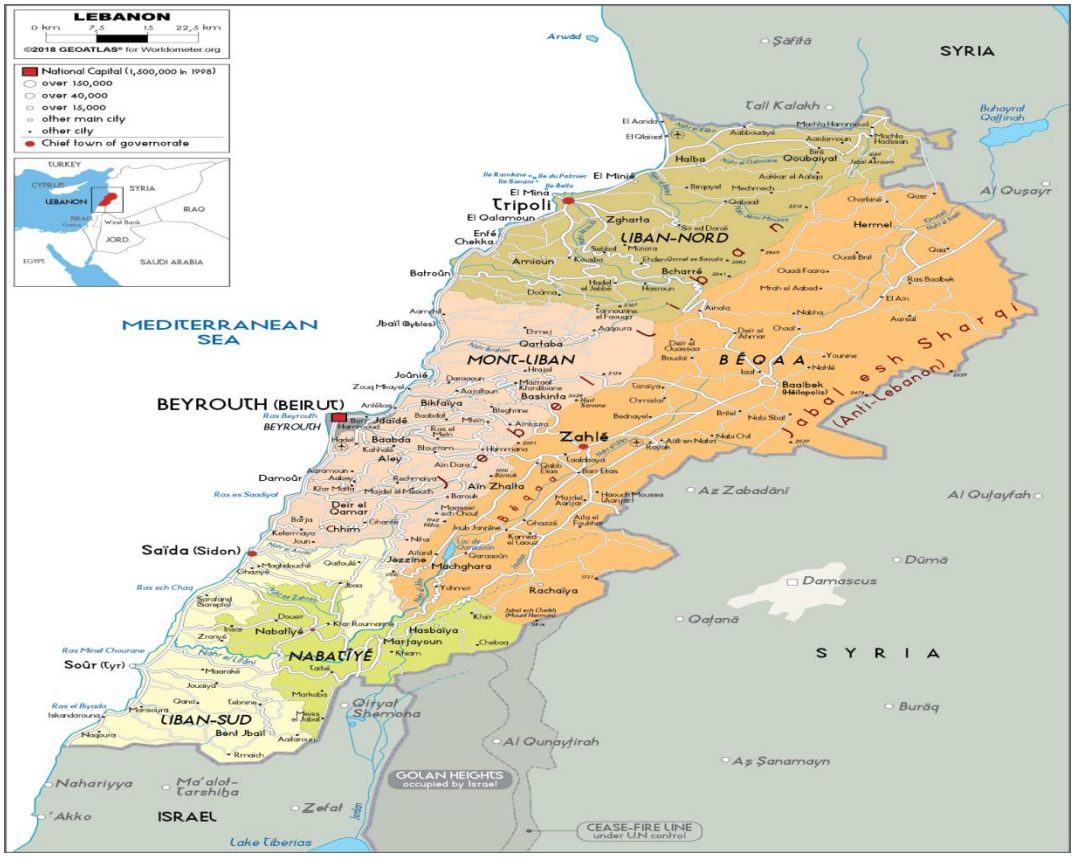
Selain itu, kebijakan ekonomi Iran juga dikendalikan sedemikian rupa untuk menjaga stabilitas rezim. Banyak sektor ekonomi yang dikelola oleh yayasan-yayasan (bonyads) yang berada di bawah kendali ulama konservatif dan Pemimpin Tertinggi. Brumberg (2001) menegaskan bahwa kebijakan ekonomi ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan sistem

Wilayat al-Faqih tetapi juga untuk memastikan bahwa kelompok elit yang setia kepada sistem tetap memiliki kendali atas sumber daya ekonomi negara.

4. **Pengaruh Wilayat al-Faqih terhadap Geopolitik Timur Tengah (Lebanon, Suriah, Irak)**

Pengaruh Wilayat al-Faqih tidak hanya terbatas di Iran, tetapi juga meluas ke berbagai negara di Timur Tengah, khususnya Lebanon, Suriah, dan Irak, melalui berbagai bentuk intervensi politik, militer, dan ideologis.

Pengaruh di Lebanon



Wilayah al-faqih dan pembentukan Hizbullah di Lebanon

Iran mulai membangun pengaruhnya di Lebanon melalui dukungan terhadap gerakan Hizbullah, yang didirikan pada tahun 1982 di tengah Perang Saudara Lebanon (1975–1990). Hizbullah dibentuk dengan bantuan langsung dari Iran dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) untuk melawan Israel yang saat itu menginvasi Lebanon (Blanford, 2011).

Menurut Byman (2005), Iran memberikan dukungan berikut kepada Hizbullah:

1. Dukungan finansial tahunan sekitar $700 juta
2. Pelatihan militer dan ideologi oleh Pasukan Quds dari IRGC
3. Penyediaan persenjataan canggih, termasuk rudal dan drone

Hizbullah mengadopsi doktrin Wilayat al-Faqih dan mengakui Supreme Leader Iran

sebagai pemimpin tertinggi mereka. Sheikh Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah saat ini, sering kali menyatakan kesetiaannya kepada Iran dan menjadikan kebijakan luar negeri Iran sebagai bagian dari strategi politik dan militernya (Levitt, 2013).

Dominasi Hizbullah dalam Politik Lebanon

Sejak tahun 2005, Hizbullah telah berkembang dari sekedap kelompok milisi menjadi kekuatan yang dominan di Lebanon, Hizbullah kini memiliki representasi besar perlemen dan berperan dalam pemerintahan Lebanon (Saab & Ranstorp, 2007).

Beberapa dampak utama Hizbullah dalam politik Lebanon adalah:

1. Memperkuat hubungan Lebanon dengan iran dan Suriah, sehingga mengisolasi Negara ini dari Negara-negara arab teluk (Gerges, 2016).
2. Mencegah reformasi politik yang dapat melemahkan pengaruh Iran, termasuk veto terhadap kebijakan yang berlawanan dengan kepentingan Teheran (Harb, 2010).
3. Menggunakan system patronase ekonomi untuk menarik dukungan komunitas syiah, yang menjadikan Hizbullah lebih kuat dari pada Negara Lebanon itu sendiri (Blanford, 2011)

Menurut Norton (2007), keberadaan Hizbullah telah menciptakan "negara dalam negara", di mana kelompok ini memiliki militer, ekonomi, dan kebijakan luar negerinya sendiri yang independen dari pemerintah Lebanon.

Dampak terhadap Stabilitas dan Keamanan Lebanon

Keberadaan Hizbullah yang berafiliasi dengan Iran telah menyebabkan instabilitas domestik dan konflik regional, di antaranya:

Ketegangan dengan Israel

Hizbullah telah menjadi ancaman utama bagi Israel, yang menyebabkan beberapa perang besar, seperti:

4. Perang Lebanon 2006, yang dipicu oleh serangan Hizbullah terhadap pasukan Israel dan penculikan tentara IDF (Bergman, 2018).
5. Serangan rudal dan drone ke wilayah Israel, yang berlanjut hingga saat ini (Eisenstadt, 2016).

Israel secara rutin melancarkan serangan udara ke posisi Hizbullah di Lebanon dan Suriah, yang memperburuk ketegangan antara kedua negara (Cafarella, 2019).

Konflik dengan Faksi Lebanon Lainnya

Hizbullah tidak hanya berkonflik dengan Israel, tetapi juga dengan faksi politik di Lebanon, seperti:

1. Blok Sunni yang didukung oleh Arab Saudi, yang menentang dominasi Iran di Lebanon (Hokayem, 2017).
2. Faksi Kristen Maronit, yang khawatir akan meningkatnya kekuatan milisi Syiah di Lebanon (Blanford, 2011).

Tahun 2008, Hizbullah bahkan melancarkan operasi militer terhadap oposisi di Beirut, menandakan bahwa mereka memiliki kekuatan militer yang lebih besar dibandingkan dengan Angkatan Bersenjata Lebanon (Gerges, 2016).

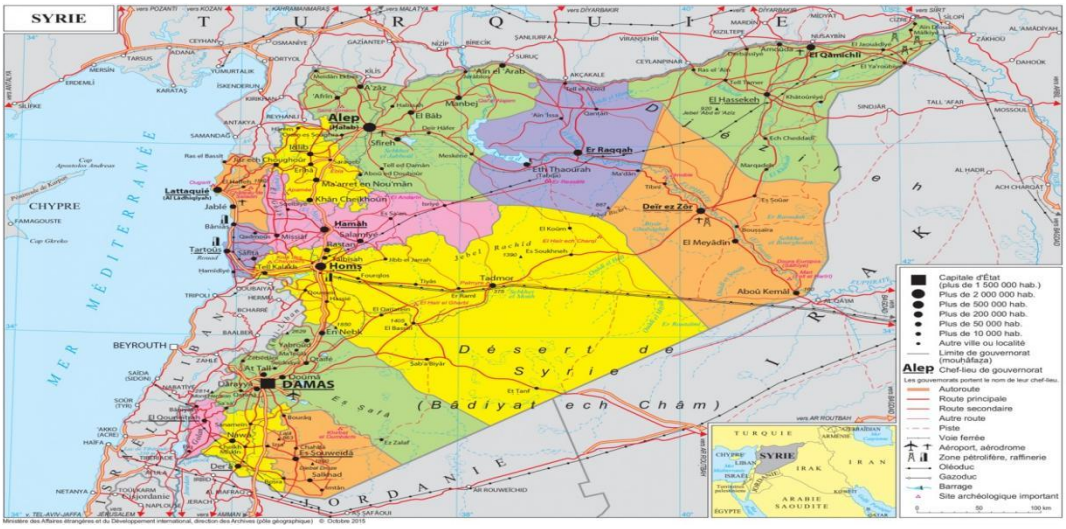
Ketergantungan Lebanon terhadap Iran

Seiring dengan melemahnya ekonomi Lebanon, Hizbullah semakin mengandalkan Iran untuk pendanaan. Iran memberikan bantuan ekonomi kepada Hizbullah dalam bentuk:

1. Investasi Investasi di sektor infrastruktur dan energi (Eisenstadt, 2016).
2. Bantuan sosial dan kesehatan kepada komunitas Syiah di Lebanon (Nasr, 2006).

Namun, ketergantungan ini membuat Lebanon rentan terhadap sanksi ekonomi dasi AS dan Negara-negara Teluk, yang semakin memperbudak krisis ekonomi Negara tersebut (Philips, 2020).

Pengaruh di Suriah



Suriah menjadi sekutu strategis Iran sejak masa pemerintahan Hafez al-Assad dan berlanjut di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad. Ketika perang sipil meletus pada tahun 2011, Iran secara aktif mendukung rezim Assad dengan mengirim Pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) serta memobilisasi milisi Syiah dari Lebanon, Irak, dan Afghanistan (Phillips, 2016).

Menurut Hinnebusch (2020), "Iran melihat Suriah sebagai jembatan strategis menuju Mediterania, dan oleh karena itu mempertahankan rezim Assad adalah kepentingan utama dalam geopolitik regionalnya." Melalui Wilayat al-Faqih, Iran berhasil mempertahankan pengaruhnya di Suriah dan memperkuat jalur darat yang menghubungkan Teheran, Baghdad, Damaskus, hingga Beirut, yang dikenal sebagai "Shia Crescent."

Iran dan Aliansi Strategis dengan Suriah

Iran dan Suriah telah menjalin hubungan erat sejak era Hafez al-Assad dan semakin kuat di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad. Beberapa faktor utama yang memeperkuat aliansi ini adalah:

1. Ideologi dan Keagamaan: Meski Suriah mayoritas Sunni, rezim Assad berasal dari sekte Alawi yang memiliki kedekatan dengan Syiah. Iran melihat Suriah sebagai mitra strategis dalam mempertahankan eksistensi kekuatan Syiah di Timur Tengah (Goodarzi, 2006).
2. Dukungan terhadap Hezbollah: Suriah merupakan jalur utama bagi Iran untuk memasok senjata ke Hezbollah di Lebanon, yang merupakan alat proksi utama Iran dalam menghadapi Israel (Blanford, 2011).
3. Perlindungan terhadap 'Poros Perlawanan': Iran, Suriah, dan Hezbollah membentuk apa

yang dikenal sebagai "Axis of Resistance," yang menentang dominasi Israel dan AS di kawasan (Eisenstadt, 2016).

Peran Iran dalam perang saudara Suriah

Ketika perang saudara suriah pecah pada 2011, Iran segara memberikan dukungan besar kepada rezim Assad, yang terdiri dari:

Dukungan Militer

1. Iran mengirimkan Pasukan Quds dari IRGC (Korps Garda Revolusi Islam) untuk membantu pasukan Assad dalam melawan kelompok oposisi dan ekstremis (Smyth, 2015).
2. Iran juga merekrut dan mendanai milisi Syiah asing, termasuk dari Irak, Afghanistan, dan Pakistan, seperti Brigade Fatemiyoun dan Zainabiyoun (Soleimani, 2019).
3. Menyediakan teknologi drone dan rudal yang digunakan oleh pasukan Suriah (Eisenstadt, 2016).

Dukungan Ekonomi

1. Iran memberikan pinjaman miliaran dolar kepada Suriah untuk menopang ekonomi negara yang terkuras akibat perang (Tabatabai, 2019).
2. Investasi dalam proyek infrastruktur dan energi, termasuk pengelolaan pelabuhan dan ladang minyak di Suriah.
3. Iran memberikan pinjaman miliaran dolar kepada Suriah untuk menopang ekonomi negara yang terkuras akibat perang (Tabatabai, 2019).

Dukungan Politik

1. Iran aktif melakukan diplomasi untuk mencegah kejatuhan Assad, termasuk melalui kerja sama dengan Rusia dalam pembentukan format negosiasi Astana (Phillips, 2020).

Dampak Keterlibatan Iran di Suriah terhadap Geopolitik Timur Tengah

Perubahan Keseimbangan Kekuatan Regional

Keterlibatan Iran di Suriah mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan dengan cara berikut:

1. Memperkuat Pengaruh Iran di Levant, terutama di Suriah dan Lebanon.
2. Membatasi dominasi Saudi dan AS**,** yang mendukung kelompok oposisi Suriah. Meningkatkan ketegangan dengan Israel, yang khawatir dengan keberadaan pasukan Iran di perbatasannya (Bergman, 2018).

Perubahan Keseimbangan Kekuatan Regional

Israel menganggap kehadiran Iran di Suriah sebagai anacaman langsung dan telah melakukan ratusan serangan udara terhadap fasilitas militer iran di suriah (Steinberg, 2020).

Dampak terhadap Hubungan Iran-Rusia

Meskipun Iran dan Rusia mendukung Assad, ada persaingan terselubung dalam membentuk masa depan Suriah pascaperang. Rusia lebih mendukung solusi diplomatik, sementara Iran ingin mempertahankan keberadaan milisi proksinya untuk mempertahankan pengaruh jangka panjang di Suriah (Fulton, 2019).

Setelah invasi AS ke Irak pada tahun 2003 dan jatuhnya rezim Saddam Hussein, Iran

memperluas pengaruhnya di Irak melalui berbagai kelompok milisi Syiah, seperti Kata'ib Hezbollah, Asa'ib Ahl al-Haq, dan Badr Organization. Para pemimpin kelompok ini sering kali memiliki hubungan langsung dengan pemimpin Iran dan tunduk pada prinsip Wilayat al-Faqih (Alfoneh, 2012).

Selain itu, Iran juga mempengaruhi struktur politik Irak dengan mendukung partai-partai Syiah dalam pemerintahan. Menurut Mabon (2020), "Iran telah berhasil mengonsolidasikan kekuatannya di Irak melalui kombinasi strategi militer, politik, dan ekonomi, yang semakin memperdalam ketergantungan Baghdad terhadap Teheran."

Pengaruh di irak



Pengaruh Politik

Setelah invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 dan jatuhnya rezim Saddam Hussein, Iran mulai memperluas pengaruhnya dengan mendukung partai-partai dan aktor politik Syiah yang sejalan dengan prinsip Wilayat al-Faqih. Iran memainkan peran penting dalam membentuk pemerintahan Irak dengan mendukung tokoh-tokoh seperti Nouri al-Maliki dan Hadi al-Amiri yang memiliki kedekatan dengan Teheran (Knights, 2020).

Menurut Mabon (2020), *"Iran telah berhasil mengonsolidasikan kekuatannya di Irak melalui strategi politik yang mengutamakan hubungan erat dengan kelompok-kelompok Syiah serta pemanfaatan aktor-aktor negara dan non-negara untuk mengontrol dinamika pemerintahan."* Dengan dukungan Iran, berbagai kelompok Syiah di Irak memperoleh dominasi politik yang kuat, yang pada akhirnya menjadikan Baghdad semakin bergantung pada Iran dalam berbagai aspek pemerintahan.

Pengaruh Militer dan Keamanan

Iran juga menggunakan konsep Wilayat al-Faqih untuk membentuk jaringan milisi proksi di Irak, terutama melalui *Popular Mobilization Forces* (PMF) atau *al-Hashd al-Sha'abi*. Milisi-milisi seperti Kata'ib Hezbollah, Asa'ib Ahl al-Haq, dan Badr Organization memiliki hubungan

erat dengan Iran dan sering kali tunduk pada arahan dari pemimpin tertinggi Iran (Alfoneh, 2012).

Menurut Mansour (2018), *"PMF bukan hanya alat pertahanan terhadap ancaman eksternal seperti ISIS, tetapi juga instrumen Iran dalam mempertahankan pengaruhnya di Irak melalui kelompok-kelompok bersenjata yang loyal kepada konsep Wilayat al-Faqih."* Keberadaan milisi-milisi ini telah menciptakan dualisme kekuasaan di Irak, di mana pemerintah pusat sering kali harus bersaing dengan aktor-aktor bersenjata yang memiliki loyalitas lebih besar kepada Teheran daripada kepada Baghdad.

Selain itu, pengaruh militer Iran di Irak juga menjadi pemicu ketegangan dengan aktor-aktor regional seperti Arab Saudi dan Amerika Serikat. Serangan udara AS terhadap posisi milisi pro-Iran di Irak menunjukkan bagaimana intervensi Iran telah mengubah Irak menjadi arena persaingan geopolitik antara kekuatan-kekuatan global dan regional (Farouk, 2021).

Pengaruh Ekonomi

Iran juga telah memperdalam ketergantungan ekonomi Irak terhadapnya melalui perdagangan, investasi, dan ekspor energi. Iran memasok listrik dan gas alam ke Irak, menjadikannya salah satu mitra dagang utama Baghdad (Ehteshami & Zweiri, 2017). Selain itu, Iran juga mendominasi sektor perdagangan dengan mengekspor berbagai produk ke Irak, dari bahan makanan hingga bahan bangunan.

Menurut Farouk (2021), *"Ekspansi ekonomi Iran di Irak bukan hanya bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk memastikan Irak tetap berada dalam orbit pengaruh Iran."* Dengan menguasai sektor ekonomi Irak, Iran dapat mempertahankan pengaruh politiknya dan menekan lawan-lawan politiknya di dalam negeri Irak.

Dampak Terhadap Geopolitik Timur Tengah



Wilayat al-Faqih telah membentuk dinamika geopolitik Timur Tengah dengan beberapa dampak utama:

Ekspansi Ideologi dan Pengaruh Politik Iran

Salah satu dampak utama Wilayat al-Faqih terhadap geopolitik Timur Tengah adalah ekspansi pengaruh Iran di negara-negara mayoritas Syiah atau yang memiliki populasi Syiah signifikan. Iran mendukung berbagai kelompok bersenjata dan organisasi politik di negara-negara

seperti Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman guna memperkuat pengaruhnya di kawasan.

Menurut Nasr (2006), "Iran memanfaatkan ikatan ideologis Wilayat al-Faqih sebagai alat untuk membangun jaringan pengaruh regional yang kuat" (Nasr, 2006, hlm. 180). Hizbullah di Lebanon, sebagai contoh utama, merupakan organisasi yang secara langsung mendapatkan dukungan militer, finansial, dan ideologis dari Iran. Hizbullah berfungsi sebagai perpanjangan tangan kebijakan Iran di Lebanon dan kawasan sekitarnya (Byman, 2005).

Di Irak, pengaruh Iran semakin kuat pasca-invasi AS tahun 2003, di mana kelompok-kelompok politik Syiah yang memiliki hubungan dekat dengan Iran, seperti Dawa Party dan Fatah Alliance, mendapatkan dominasi dalam politik Irak (Sowell, 2017). Selain itu, Iran juga memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok paramiliter Syiah seperti Hashd al-Shaabi, yang memainkan peran penting dalam memerangi ISIS tetapi juga memperkuat pengaruh Iran di Irak.

Ketegangan Sektarian dan Konflik Religional

Ekspansi pengaruh Iran melalui ideologi Wilayat al-Faqih juga memicu ketegangan sektarian yang semakin mendalam antara Syiah dan Sunni di Timur Tengah. Negara-negara dengan mayoritas Sunni, terutama Arab Saudi, melihat kebijakan Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan. Ketegangan ini terlihat jelas dalam konflik di Suriah dan Yaman, di mana Iran dan Arab Saudi mendukung pihak yang berlawanan.

Politisasi Syiah melalui doktrin Wilayat al-Faqih menyebabkan ketegangan antara kelompok Syiah dan Sunni di berbagai negara, terutama di Lebanon, Suriah, dan Irak. Di Lebanon, misalnya, Hizbullah yang didukung Iran sering berbenturan dengan kelompok-kelompok Sunni dan Kristen, menciptakan polarisasi dalam politik domestik Lebanon. Di Irak, dominasi partai-partai Syiah yang berafiliasi dengan Iran telah menyebabkan ketegangan dengan komunitas Sunni dan Kurdi, yang merasa terpinggirkan dalam dinamika politik negara tersebut.

Konflik Religional

Iran menggunakan Wilayat al-Faqih sebagai dasar legitimasi untuk mendukung kelompok milisi di berbagai negara, yang sering kali berbenturan dengan kepentingan negara-negara Arab Sunni dan Barat. Di Suriah, Iran telah mengerahkan Garda Revolusi dan kelompok-kelompok milisi Syiah seperti Liwa Fatemiyoun dan Liwa Zainabiyoun untuk mendukung rezim Assad. Di Yaman, Iran mendukung kelompok Houthi dalam menghadapi koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi, menciptakan perang proksi yang memperburuk krisis kemanusiaan di negara tersebut.

Tantangan bagi Negara-Negara Teluk

Negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) memandang pengaruh Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan dan meningkatkan dukungan bagi kelompok-kelompok anti-Iran. Wehrey (2018) mencatat bahwa negara-negara Teluk telah meningkatkan kerja sama pertahanan dan memperluas aliansi dengan Amerika Serikat dan Israel sebagai respons terhadap ancaman Iran. Selain itu, Arab Saudi dan UEA juga mendukung faksi-faksi oposisi di Irak, Suriah, dan Lebanon guna menekan pengaruh Iran di kawasan.

Perubahan Struktur Keamanan

Munculnya poros "Teheran-Baghdad-Damaskus-Beirut" sebagai aliansi strategis yang menantang dominasi Barat dan sekutu-sekutunya di kawasan telah mengubah lanskap geopolitik Timur Tengah. Iran telah berhasil membangun jaringan sekutu yang memungkinkan pengaruhnya

meluas dari Teluk Persia hingga Laut Mediterania. Keberadaan koridor darat yang menghubungkan Iran ke Lebanon melalui Irak dan Suriah memberikan keuntungan strategis bagi Iran dalam menghadapi tekanan dari Israel dan AS (Fulton, 2020). Poros ini juga memperkuat posisi Iran dalam negosiasi geopolitik, baik dengan negara-negara kawasan maupun kekuatan global seperti Rusia dan China.

Dinamika Geopolitik dan Respons Internasional

Dampak Wilayat al-Faqih terhadap geopolitik Timur Tengah juga mempengaruhi hubungan internasional. Amerika Serikat dan negara-negara Barat melihat ekspansi Iran sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka di kawasan. Hal ini tercermin dalam sanksi ekonomi dan tekanan politik terhadap Iran, terutama terkait dengan program nuklirnya.

Selain itu, Israel juga melihat pengaruh Iran sebagai ancaman strategis, terutama dengan kehadiran Hizbullah di perbatasan Lebanon dan keterlibatan Iran di Suriah. Hal ini telah menyebabkan serangkaian serangan udara Israel terhadap fasilitas militer Iran di Suriah dalam beberapa tahun terakhir (Harel, 2020).

Di sisi lain, Rusia dan China cenderung mendukung Iran dalam menghadapi tekanan Barat. Rusia, misalnya, memiliki kepentingan bersama dengan Iran dalam mendukung rezim Assad di Suriah, sementara China memiliki kepentingan ekonomi dalam menjaga hubungan baik dengan Iran untuk keperluan energi dan perdagangan (Fulton, 2020).

KESIMPULAN

Pemikiran politik Ayatollah Khomeini tentang Wilayat al-Faqih telah memberikan dampak besar terhadap struktur politik Iran dan geopolitik Timur Tengah. Konsep ini, yang berakar dalam tradisi Syiah dan memperoleh bentuk modernnya setelah Revolusi Islam 1979, menempatkan ulama sebagai pemimpin tertinggi negara. Implementasi Wilayat al-Faqih tidak hanya mengubah sistem pemerintahan Iran tetapi juga memengaruhi stabilitas kawasan melalui dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok yang sejalan dengan ideologi ini, seperti Hizbullah di Lebanon dan kelompok Syiah di Irak serta Yaman.

Dalam politik domestik Iran, Wilayat al-Faqih berfungsi sebagai dasar hukum yang menegaskan supremasi pemimpin tertinggi atas semua aspek pemerintahan, menciptakan sistem yang menggabungkan demokrasi prosedural dengan otoritas keagamaan absolut. Sementara itu, di tingkat regional, Iran menggunakan konsep ini sebagai alat ekspansi ideologis dan geopolitik, menantang dominasi negara-negara Sunni seperti Arab Saudi serta memperumit dinamika hubungan internasional di kawasan.

Namun, konsep ini juga menghadapi tantangan dan kritik. Di dalam negeri, Wilayat al-Faqih mendapat perlawanan dari kelompok reformis yang menginginkan sistem yang lebih demokratis. Secara global, kebijakan Iran berbasis Wilayat al-Faqih sering kali memicu ketegangan dengan negara-negara Barat dan sekutu regionalnya, terutama dalam konteks konflik di Suriah, Irak, dan Yaman.

Kesimpulannya, Wilayat al-Faqih tidak hanya merupakan doktrin politik-keagamaan, tetapi juga instrumen strategis yang membentuk kebijakan domestik dan luar negeri Iran. Studi ini menunjukkan bahwa memahami evolusi dan penerapan konsep ini sangat penting untuk menganalisis dinamika politik Timur Tengah kontemporer serta interaksi antara ideologi Islam dan geopolitik modern.

Wilayat al-Faqih telah menjadi faktor utama dalam dinamika geopolitik Timur Tengah, khususnya di Lebanon, Suriah, dan Irak. Melalui strategi diplomasi, dukungan militer, dan

ekspansi ideologis, Iran telah berhasil memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Namun, hal ini juga menimbulkan ketegangan sektarian, memperburuk konflik regional, dan memperumit hubungan Iran dengan negara-negara tetangganya. Dengan meningkatnya persaingan antara Iran dan negara-negara Arab Sunni, serta keterlibatan aktor global seperti AS dan Rusia, Wilayat al-Faqih akan terus memainkan peran sentral dalam perkembangan geopolitik Timur Tengah ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel:

Abrahamian, E. (2008). *A History of Modern Iran.* Cambridge University Press.
Alfoneh, A. (2012). *Iran Unveiled: How the Revolutionary Guards Is Transforming Iran from Theocracy into Military Dictatorship.* AEI Press.
Amanat, A. (2017). *Iran: A Modern History.* Yale University Press.
Arjomand, S. A. (2009). *After Khomeini: Iran Under His Successors.* Oxford University Press.
Bergman, R. (2018). *Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations.* Random House.
Blanford, N. (2011). *Warriors of God: Inside Hezbollah's Thirty-Year Struggle Against Israel.* Random House.
Brumberg, D. (2001). *Reinventing Khomeini: The Struggle for Reform in Iran.* University of Chicago Press.
Byman, D. (2005). *Deadly Connections: States That Sponsor Terrorism.* Cambridge University Press.
Dabashi, H. (2006). *Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran.*Transaction Publishers.
Eisenstadt, M. (2016). *Iran's Influence in Syria: The Military and Economic Dimension.* Washington Institute.
Ehteshami, A., & Zweiri, M. (2017). *Iran and the Rise of its Neoconservatives: The Politics of Tehran's Silent Revolution.* I.B. Tauris.
Farouk, Y. (2021). *Iran's Economic Influence in Iraq: Winning the Battle, Losing the War?* Carnegie Endowment for International Peace.
Floor, W. (2001). *Safavid Government Institutions.* Costa Mesa: Mazda Publishers.
Fulton, W. (2019). *Iran and Russia in Syria: Competition or Cooperation?* Middle East Institute.
Fulton, W. (2020). *Iran's Strategic Presence in the Levant.* Middle East Institute Report.
Gasiorowski, M. (1991). *U.S. Foreign Policy and the Shah: Building a Client State in Iran.* Cornell University Press.
Gerges, F. (2016). *ISIS: A History.* Princeton University Press.
Goodarzi, J. (2006). *Syria and Iran: Diplomatic Alliance and Power Politics in the Middle East.* I.B. Tauris.
Harel, A. (2020). *Israel's Covert War Against Iran in Syria.* Haaretz.
Hinnebusch, R. (2020). *Syria: Revolution, Civil War and State Formation.* Routledge.
Katouzian, H. (2009). *The Persians: Ancient, Mediaeval and Modern Iran.* Yale University Press.
Keddie, N. R. (1980). *Religion and Rebellion in Iran: The Tobacco Protest of 1891–1892.* Frank Cass Publishers.
Keddie, N. R. (2003). *Modern Iran: Roots and Results of Revolution.* Yale University Press.

Khomeini, R. (1970). *Wilayat al-Faqih: Governance of the Jurist.*
Knights, M. (2020). *Iran's Foreign Legion: The Role of Iraqi Militias in Regional Proxy Warfare.* The Washington Institute.
Lapidus, I. M. (2002). *A History of Islamic Societies.* Cambridge University Press.
Mabon, S. (2020). *Houses Built on Sand: Violence, Sectarianism and Revolution in the Middle East.* Manchester University Press.
Mabon, S. (2020). *Saudi Arabia and Iran: Soft Power Rivalry in the Middle East.* I.B. Tauris.
Mansour, R. (2018). *Networks of Power: The Popular Mobilization Forces and the State in Iraq.* Chatham House.
Milani, A. (1994). *The Persian Sphinx: Amir Abbas Hoveyda and the Riddle of the Iranian Revolution.* I.B. Tauris.
Milani, A. (2011). *The Shah.* Palgrave Macmillan.
Morgan, D. (2016). *Medieval Persia 1040-1797.* Routledge.
Nasr, S. V. R. (2006). *The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future.* W.W. Norton.
Newman, A. (2006). *Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire.* I.B. Tauris.
Norton, A. R. (2007). *Hezbollah: A Short History.* Princeton University Press.
Phillips, C. (2016). *The Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle East.* Yale University Press.
Phillips, C. (2020). *The Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle East.* Yale University Press.
Saab, B. Y. (2018). *Iran's Hezbollah Model in Iraq.* Middle East Institute.
Savory, R. (1980). *Iran Under the Safavids.* Cambridge University Press.
Smyth, P. (2015). *The Shiite Jihad in Syria and Its Regional Effects.* Washington Institute.
Soleimani, Q. (2019). *Iran's Strategy in Syria and the Role of Shia Militias.* Institute for the Study of War.
Sowell, K. (2017). *Iran's Expanding Influence in Iraq.* Carnegie Endowment for International Peace.
Steinberg, G. (2020). *Israel's Strategy Against Iran in Syria.* BESA Center.
Tabatabai, A. (2019). *Iran's Economic Influence in Syria: An Analysis.* Carnegie Endowment.
Wehrey, F. (2014). *Sectarian Politics in the Gulf: From the Iraq War to the Arab Uprisings.* Columbia University Press.
Wehrey, F. (2018). *Beyond Sunni and Shia: The Roots of Sectarianism in a Changing Middle East.* Oxford University Press.

Sumber Online:

BBC News Indonesia. (2024). Peta konflik di Timur Tengah dan pengaruh Iran. BBC. https://www.bbc.com/indonesia/articles/ceqn0j3e5qqo
World Maps. (2024). Syria political map. World Maps. https://www.worldmaps.info/Syria
Worldometers. (2024). Iraq political map. Worldometers. https://www.worldometers.info/maps/iraq-political-map/
Worldometers. (2024). Lebanon political map. Worldometers. https://www.worldometers.info/maps/lebanon-political-map/